

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori yang mendasari penelitian skripsi. Pembahasan ini akan menjadi panduan dalam memahami secara mendalam untuk memecahkan permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan beberapa teori. Teori yang digunakan yaitu teori pembangunan ekonomi, teori infrastruktur ekonomi, teori infrastruktur sosial, dan teori kemiskinan.

2.1 Teori Infrastruktur

Stone (1974), dalam Kodoatie (2005), menyatakan bahwa infrastruktur adalah fasilitas yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan *similar* untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. Pengertian infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015, jenis infrastruktur mencakup beberapa bagian:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan aktivitas ekonomi yang mempunyai dampak positif, meliputi utilitas publik (gas, telekomunikasi, energi, air), pekerjaan umum (irigasi, pengolahan

limbah, jalan, bendungan), dan sektor transportasi (pelabuhan, jalur kereta api, bandara).

2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi kontrol administrasi dan penegakan hukum.

2.1.1 Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi yang dijelaskan pada bagian ini adalah infrastruktur yang dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi yaitu berupa jalan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota) dalam satuan kilometer (km), yang merupakan salah satu infrastruktur darat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di desa maupun di kota.

2.1.1.1 Infrastruktur Jalan

Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi baik di wilayah desa hingga wilayah kota, infrastruktur jalan merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya yang menyebabkan perputaran ekonomi makin pesat. Wahyuni (2009) apabila prasarana jalan rusak dan buruk alokasi sumber daya menjadi terhambat, pendistribusian faktor produksi, pembangunan industri, jasa dan barang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat pendapatan.

Menurut undang-undang nomor 38 (2004), dari segi fungsinya jalan umum dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, dan kecepatan rata-rata tinggi. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

2.2.1 Infrastruktur Sosial

Infrastruktur sosial adalah infrastruktur yang memiliki peran untuk menyediakan keperluan tatanan kehidupan manusia agar keharmonisan kehidupan tetap terjaga. Terdapat beberapa infrastruktur sosial dua diantaranya yang paling penting adalah infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan.

2.2.1.1 Infrastruktur Kesehatan

Kesehatan pada dasarnya merupakan kebutuhan yang paling pokok dari tubuh manusia, oleh karena itu pembangun infrastruktur kesehatan menjadi bagian integral dari pembangunan nasional karena bidang kesehatan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia secara berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terarah. Pembangunan infrastruktur

kesehatan juga merupakan upaya untuk tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan yang optimal (Pohan dan Halim, 2013).

Depkes (2014), dalam Wahyuni (2009), pembangunan infrastruktur kesehatan memiliki tujuan penting dalam rencana strategi pembangunan infrastruktur negara yaitu kegiatan atau program pembangunan kesehatan yang diberi pemerintah untuk jaminan kesehatan masyarakat yang jauh lebih baik. Sesuai dengan visi pemerintah yaitu “Indonesia Sehat 2010”. Kebijakannya adalah:

1. Sumber daya manusia dan lingkungan yang mendukung, tujuan dari visi tersebut supaya masyarakat bisa memberikan prioritas pada dirinya sendiri baik untuk pencegahan, pemulihan, rehabilitasi, penyembuhan, dan meningkatkan kesehatan.
2. Pemberdayaan sumber daya manusia yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan suatu pelayanan kesehatan dan mutu Lembaga, serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan haknya masing-masing baik kualitas dan kuantitas dalam medis, termasuk ketersediaan obat yang dibutuhkan dan harga yang terjangkau untuk masyarakat.
3. Pemerintah mengupayakan tersedianya infrastruktur kesehatan melalui rumah sakit, puskesmas, serta pelayanan kesehatan lainnya supaya kesehatan masyarakat bisa terpenuhi serta meningkatkan

pembangunan kesehatan yang merata. Pemerintah memiliki harapan dengan adanya pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia jauh lebih baik dari sebelumnya dan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.1.2 Infrastruktur Pendidikan

Sri Minarti (2011), pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia. Tersedianya infrastruktur pendidikan segala potensi dan bakat yang terpendam dapat bermanfaat bagi diri pribadi maupun kepentingan orang banyak, dalam hal ini pendidikan merupakan faktor pendukung manusia mengatasi segala persoalan kehidupan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, dalam kenyataannya mampu membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih beradab. Pendidikan juga merupakan investasi yang paling utama bagi bangsa, apalagi bagi bangsa yang dang berkembang, pembangunan hanya dipersiapkan melalui pendidikan.

Keterlibatan pemerintah dalam wilayah pendidikan juga tidak harus dominan (sentral), pada pembangunan non fisik semata-mata, tetapi perlu kemudian dilakukan perimbangan yang adil antara pembangunan fisik dan non fisik. Posisi pendidikan di daerah yang bila berkecenderungan diskriminatif dalam tahap pelaksanaan pembangunan

yang bersandar pada nilai-nilai keadilan, kiranya membutuhkan perbaikan serta penyesuaian yang proporsional (Haji *et al*, 2015).

2.2 Teori Kemiskinan

Menurut Haughton dan Shahidur (2012) kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak dianggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut memengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

Kemiskinan menurut Arsyad (2010) dalam Ayu dan Ayu (2012) kemiskinan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar seperti kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.
2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidak pemerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya, atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Ahli ekonomi menganalisis masalah kemiskinan yang terjadi di seluruh negara bagian bumi ini baik dalam jangka waktu dekat maupun dalam jangka waktu

yang cukup panjang. Berikut ini merupakan pembahasan teori kemiskinan menurut para ahli ekonomi:

1. Pandangan Nurkse

Nurkse pada teorinya mengemukakan tentang lingkaran setan kemiskinan, Nurkse berpendapat kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh hambatan pembangunan pada masa yang akan datang. Nurkse juga berpendapat bahwa inti dari lingkaran kemiskinan adalah keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya modal yang tinggi.

2. Pandangan Oscar Lewis

Oscar Lewis dalam teorinya berpendapat bahwa orang miskin akan tetap miskin karena mereka belajar perilaku orang miskin di mana mereka belajar untuk malas bekerja, boros, tidak visioner, dan dia juga berkata bahwa kemiskinan diturunkan generasi ke generasi karena anak diajarkan dengan nilai-nilai dan tujuan kemiskinan.

3. Pandangan Michael Sherraden

Michael Sherraden pada teorinya membahas mengenai perilaku manusia untuk menetapkan pilihan, motivasi, *attitude*, dan *human capital*. Michael berpendapat kemiskinan terjadi karena tidak adanya kemampuan individu dalam menyikapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, dia juga berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena pilihan individu, jadi manusia

sendiri yang menentukan apakah dia memilih untuk lepas dari kemiskinan atau bertahan dalam kondisi kemiskinan.

2.3 Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia

Menurut Subri (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ekonomi sumber daya manusia diartikan sebagai ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, atau ekonomi sumber daya manusia adalah penerapan teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia.

Ekonomi sumber daya manusia tidak memiliki teori baru yang dipakai, keseluruhan dasar teorinya adalah teori ekonomi makro dan ekonomi mikro namun penerapannya berbeda, berikut adalah pengembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia:

2.3.1 Teori Klasik Adam Smith (1729-1790)

Adam Smith mencurahkan perhatiannya pada alokasi sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi, Adam Smith percaya bahwa manusia adalah faktor produksi utama yang akan menentukan kemakmuran, karena tanah tidak ada artinya jika tidak ada sumber daya manusia yang mampu mengolahnya agar berguna untuk kehidupan.

2.3.2 Teori Malthus Thomas Robert Malthus (1766- 1834)

Adam Smith pada teorinya percaya bahwa tingkat kesejahteraan manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari adanya spesialisasi,

tetapi di sisi lain Malthus pesimis dengan masa depan manusia, Malthus menyatakan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi, luasnya terbatas dan semakin terbatas lagi untuk menghasilkan bahan makanan karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik dan bangunan lainnya. Jumlah populasi penduduk terus bertambah sehingga rata-rata produksi pangan yang tersedia semakin berkurang, jumlah pangan menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berdampak pada perebutan makanan. Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang besar akan menyebabkan penurunan produksi per kapita, satu-satunya cara untuk menghindari malapetaka ini adalah dengan mengontrol jumlah populasi penduduk, yaitu dengan pengendalian moral dengan cara penundaan usia perkawinan, mengurangi jumlah anak.

2.3.3 Teori Keynes Pemikiran John Meynard Keynes (1936)

Salah satu implikasi dari kebijakan Keynes adalah bahwa dalam jangka pendek *aggregate demand* harus ditingkatkan bila ingin meningkatkan *employment*. *Multiplier* akan lebih besar jika peningkatan *aggregate demand* berasal dari peningkatan investasi, sehingga dapat dikatakan bukan *supply creates its own demand* seperti yang dikatakan, tetapi *demand its own supply*, dengan kata lain peningkatan permintaan akan meningkatkan *employment* hanya bila tersedia kapasitas produksi yang belum digunakan. Kapasitas produksi ini berkaitan dengan modal fisik dan modal manusia.

Aspek pemanfaatan dan fungsi sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk), sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental). Uraian singkat di atas dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi sumber daya manusia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu secara makro dan mikro, di mana secara mikro sumber daya manusia berperan dalam hal faktor produksi (ketenagakerjaan), sedangkan secara makro peran sumber daya manusia dalam hal pembangunan dan kependudukan (Idris, 2018).

Theodore Schultz mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu bentuk investasi dalam pembangunan. Schultz juga memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan mempromosikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.4 Teori Produktivitas Tenaga Kerja

Konsep produktivitas dapat dipahami dari dua dimensi, yaitu dari dimensi individu dan dimensi organisasi, untuk mempelajari masalah produktivitas dari dimensi individu tidak lebih dari untuk melihat produktivitas, terutama dalam kaitannya dengan karakteristik kepribadian individu. Pemahaman dalam konteks ini esensi dari produktivitas adalah sikap mental yang selalu memiliki visi bahwa

kualitas hidup hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini (Kusnendi, 2003).

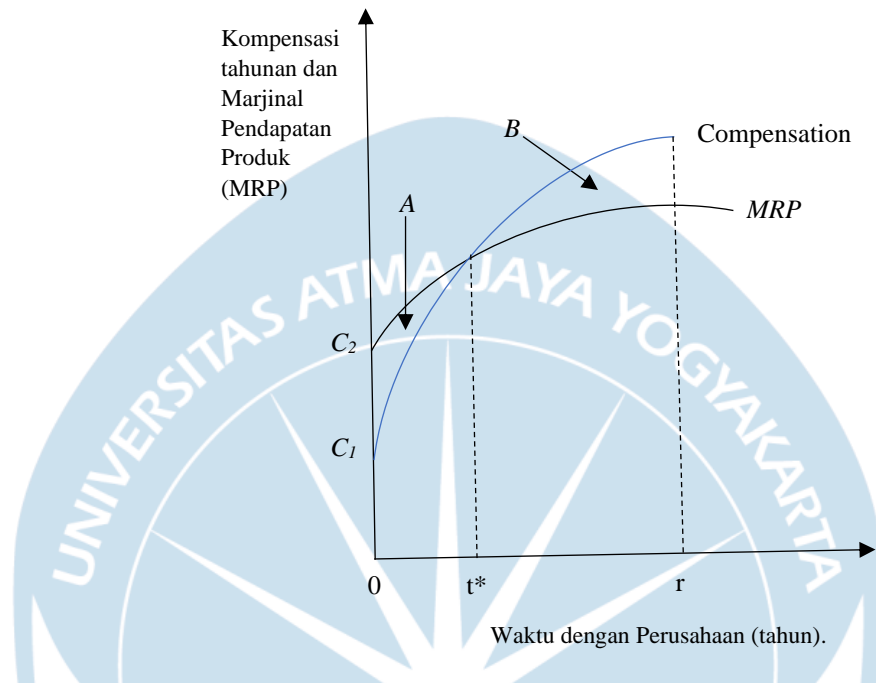
Menurut Muchdarsyah (2005) mengisyaratkan dua kelompok syarat bagi produktivitas perorangan yang tinggi:

1. Kelompok pertama yaitu tingkat pendidikan dan keahlian, jenis teknologi dan hasil produksi, kondisi kerja, kesehatan, kemampuan fisik dan mental.
2. Kelompok kedua yaitu sikap mental, rekan kerja dan pengawas, keanekaan ragam tugas, sistem insentif, kepuasan kerja.

Menurut Burhanuddin (2015) pada penelitiannya menyatakan produktivitas dapat diukur melalui beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan, konsep pengetahuan lebih berorientasi pada inteligensi, penguasaan ilmu, dan daya pikir.
2. Keterampilan, yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional bidang tertentu.
3. Kemampuan, dalam hal ini mencakup pengetahuan dan keterampilan individu termasuk faktor pembentuk kemauan.

Gambar 1.4
Kurva Produktivitas



Sumber: Buku Erhenberg (2012).

Pada gambar kurva di atas diasumsikan bahwa MRP meningkat sepanjang karir karyawan, tetapi selama t^* tahun pertama kerja, kompensasi tetap di bawah MRP, pada titik tertentu dalam karir seorang karyawan (tahun t^* dalam diagram), remunerasi mulai melebihi MRP. Dari t^* sampai r tahun pensiun, ini adalah periode di mana pekerja yang rajin menerima kompensasi melebihi apa yang seharusnya tersedia (yaitu, MRP). Agar perusahaan dapat bersaing di pasar tenaga kerja dan pasar produk, nilai sekarang dari area A dalam diagram harus sama dengan nilai sekarang dari area B. (Segmen B lebih besar dari area A pada Gambar 1.4 Masa depan menerima diskon yang lebih besar dalam perhitungan nilai sekarang (Erhenberg, 2012).

2.5 Studi Terkait

Tinambunan, Findi, dan Purnamadewi (2019) menganalisis pengaruh pengembangan infrastruktur terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan panel simultan dan tipologi *klassen* yang dilengkapi dengan 2 persamaan struktural. Hasil dari analisis studi ini menunjukkan bahwa infrastruktur listrik, pendidikan, transportasi dan air memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, sementara itu, infrastruktur pendidikan, listrik, Kesehatan dan transportasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Variabel populasi dan pertumbuhan ekonomi sama-sama memengaruhi kemiskinan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Pasaribu (2016) pada penelitiannya menganalisis pengaruh pengeluaran fungsi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur terhadap kemiskinan di 33 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (data *time series* 4 tahun dan data *cross section* sebanyak 33 provinsi yang menghasilkan 132 observasi). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan model efek tetap. Hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran fungsi pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dan perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah fungsi infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Mugiyono (2019) pada penelitiannya menganalisis pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dengan menggunakan data sekunder dan pengolahan data panel di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2012-2016, didapatkan model terbaik adalah *Random Effect*. Variabel infrastruktur yang digunakan adalah infrastruktur jalan, listrik, air bersih, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sanitasi. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa dengan bertambahnya ketersediaan infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sanitasi berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, sedangkan infrastruktur listrik, air bersih, dan irigasi tidak berpengaruh.

Purnomo, Wijaya, dan Setiawan (2021) pada penelitiannya bertujuan menganalisis pengaruh infrastruktur ekonomi, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data panel dan pengolahan data menggunakan aplikasi *Eviews*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2018, sementara itu infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Yogyakarta tahun 2003-2018. Implikasi dari penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur harus merata dan adil di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada daerah yang angka kemiskinannya tinggi.